RENSTRA 2025 - 2029

SATUAN POLISI PAMONG Ppraja

KABUPATEN NGANJUK



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, dapat tersusun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk ini disusun berdasarkan amanat dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan Renstra ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapain tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.

Penyusunan rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaannya.

Dengan terselesaikannya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaiannya dan semoga dapat menjadi suatu Pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk

memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak sebagai penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Demi terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bahwa Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif dengan periode 5 (lima) tahun.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2024; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau

masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2010 tentang Ketentraman ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak asasi Manusia ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedomon Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi,Kodefikasi dan Nomorklatur Perencana Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 ;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Tahun 2023-2043;
29. Peratutran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;

33. Peratutan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 2025-2029;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Restra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025- 2029 , disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Pelayanan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH....

a. Tugas,Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

d. Kelompok Sasaran Layanan

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a Identifikasi Permasalahan

b Perumusan Isu Strategis

BAB III TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun

2025-2029

3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program,Kegiatan,Sub kegiatan beserta kinerja indikator dan target pagu indikatif
4.2 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
4.3 Target keberhasilan pecapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
4.4 Target penyelengaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)
BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar yaitu ketentraman ketertiban umum dan pelindungan masyarakat,

secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mutlak dibentuk dengan menegakkan regulasi di daerah dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

Tindak lanjut dari ketentuan yang diuraikan diatas Satuan Polisi Pamong Praja secara kelembagaan sebagai perangkat Daerah, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah secara eksplisit menyatakan bahwa instasi penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di daerah diamanahkan pada Satuan PolisiuPamong Praja . Selanjutnya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Satuan Polisi Pamong mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Perlindungan masyarakat.

a. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian memunculkan konsekuensi terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah baru menyesuaikan atas apa yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

a. Penyusunan program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

b. Pelaksanaan Koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan instasi terkait;

c. Pengawasan terhadap masyarakat,aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ;

d. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;

e. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan Susunan lembaga yang terdiri dari :

a. Kepala Satuan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, pengawasan, ketatausahaan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja

b. Sekretariat

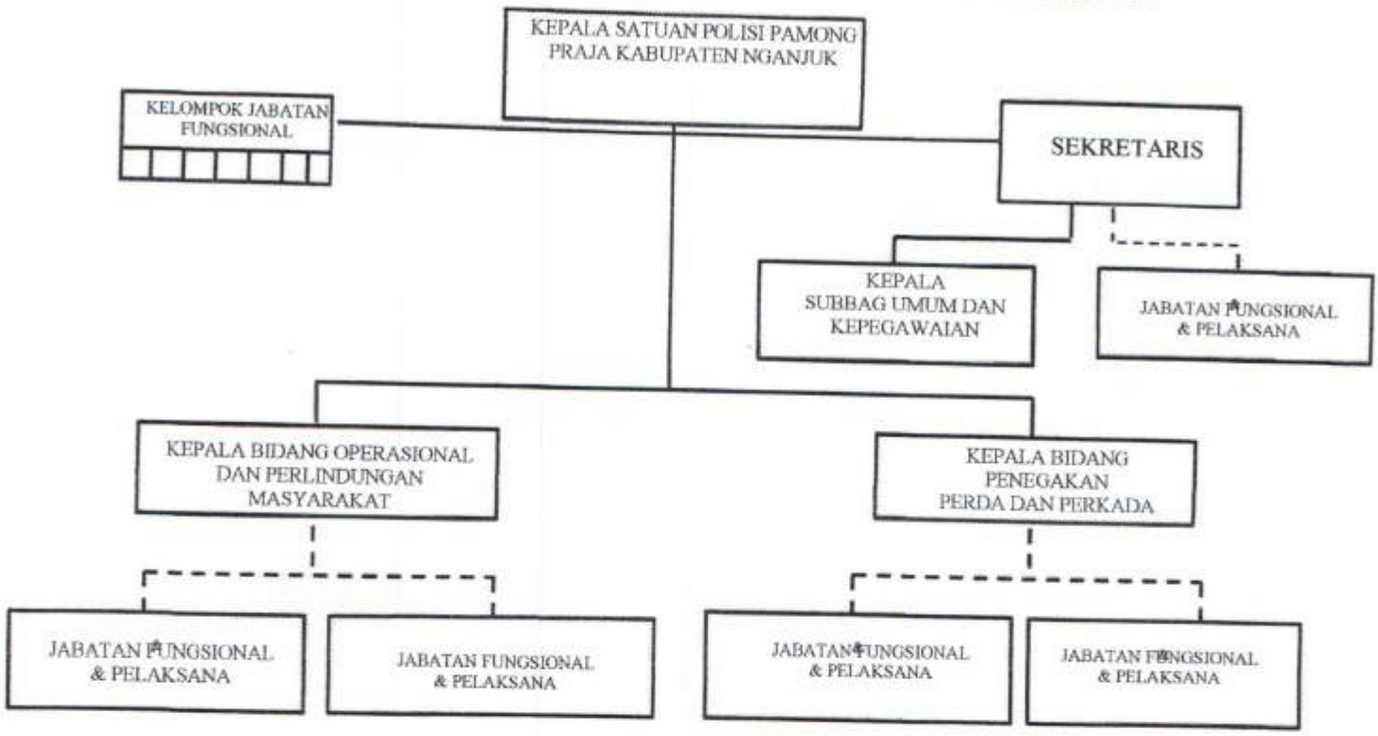
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencaan,keuangan,urusan tata

usaha,perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

SUSUNAN ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk pada bulan April 2025 memiliki personil sebanyak 51 Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Kontrak sebanyak 26, dengan kualifikasi yang terbagi pada tabel sebagai berikut :

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sebanyak 51 orang dan Tenaga Kontrak 26 orang , yang terbagi :

1.	Pejabat Struktural	: 5	Orang
2.	Perencana Ahli Muda	: 1	Orang
3.	Pol PP Ahli Muda	: 1	Orang
4.	Pejabat Fungsional	: 3	Orang
5.	Staf Administrasi	: 16	Orang
6.	Pranata Pasukan Dalam	: 24	Orang
7.	Pranata Perlindungan Masyarakat	: 1	Orang
8.	Tenaga Kontrak	: 26	Orang
	Jumlah	: 76	Orang

Kualifikasi Pendidikan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, yaitu :

1) Pendidikan Formal

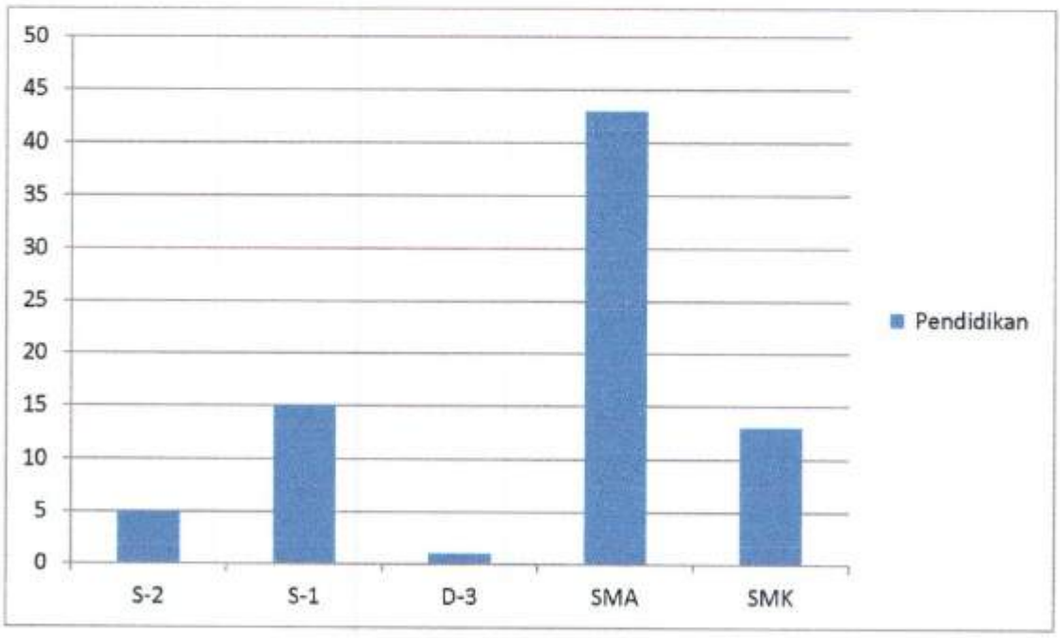
- S-2 : 5 orang
- S-1 : 15 orang
- SMA : 43 orang
- SMK : 13 orang
- D3 : 1 orang

2) Golongan

- Golongan I : - orang
- Golongan II : 13 orang
- Golongan III : 26 orang
- Golongan IV : 4 orang

Grafik 2.b.1

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk berdasarkan Pendidikan s/d April 2025



Sumber data DUK Perangkat Daerah s/d Bulan April 2025

Jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada tabel 2.1 diatas didistribusikan ke dalam Sekretariat sebanyak 10 orang, Bidang Penegakan Peraturan Daerah 5 orang, Bidang Operasional dan Linmas Masyarakat 30 orang.

Tabel 2.b.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang sesuai Jabatan/Eselon – Laki-laki dan Perempuan s/d April 2025

No	Bidang	Jabatan/Esselon											
		II		III		IV		Fungsional		Pelaksana		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Sekretariat	1	-	1	-	-	1	-	2	4	1	6	4
2.	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	5	-
4.	Bidang Operasional dan Linmas	-	-	1	-	-	-	4	-	26	-	36	-
JUMLAH		**1**	**-**	**3**	**-**	**-**		**4**	**2**	**34**	**1**	**47**	**4**

Sumber data DUK Perangkat Daerah s/d Bulan April 2025

Tabel 2.b.3

Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d April 2025

NO.	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN								JUMLAH	
		S2		S1		SMA		SMK			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sekretariat	1	1	2	3	1	-	2	-	6	4
2.	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	1	-	3	-	1	-	-	-	5	-
4.	Bidang Operasional dan Linmas	2	-	4	-	26	-	4	-	36	-
JUMLAH		**4**	**1**	**9**	**3**	**22**	**-**	**6**	**-**	**47**	**4**

Sumber data DUK Perangkat Daerah s/d Bulan April 2025

Dari tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa distribusi pegawai untuk **Sekretariat** sebanyak 10 orang, sebanyak 7 orang diantaranya berpendidikan S2/S1, sisanya sebanyak 3 orang berpendidikan SMA/SMK sementara untuk **Bidang Penegakan Peraturan Daerah** dengan jumlah pegawai sebanyak 5 orang, 4 orang diantaranya berpendidikan S1/S2, sisanya sebanyak 1 orang

berpendidikan SLTA, sedangkan **Bidang Trantibum Linmas** dengan jumlah pegawai 36 orang PNS berpendidikan SLTA 30 orang, berpendidikan S1/S2 6 Orang , tenaga honorer 26 orang berpendidikan SLTA, serta. Untuk **Kelompok Jabatan Fungsional** dengan jumlah Pegawai sebanyak 5 orang, 3 orang /S1/S2, sisanya sebanyak 2 orang berpendidikan SLTA

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja SKPD untuk melaksanakan kegiatan . Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sampai dengan April sebagaimana table berikut :

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A	**Gedung Kantor**			
1.	Ruang Kerja Pimpinan dan Staf	7	7	
2.	Ruang Pos Jaga	2	3	
3.	Ruang Rapat	1		1
4.	Ruang Layanan Pengaduan dan Pemeriksaan (PPID)	0		
5.	Ruang Penyimpanan Barang dan Gudang	1		1
6.	Ruang Sekretariat PPNS	0		
7.	Ruang Sidang Majelis Kode Etik	0		
8.	Tempat Apel/Upacara	1	1	
9.	Halaman Parkir	2	2	
B	**Kendaraan Operasional Satpol PP**			
1.	Sepeda Motor (trail, R2 Lainnya)	29	29	
2.	Jenis Offroad/Jeep (Pamwal)	1	1	
3.	Mini Bus atau Van (mobil jabatan, operasional)	4	1	3
4.	Truk Kecil (Mobil pick up/patroli)	1		1
5.	Truk Sedang (Hilux, Raisa)	2	2	
6.	Truk Besar	0		
7.	Kendaraan Lain (Speedboat)	4	4	
C	**Perlengkapan Operasional**			

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
I	**Perorangan**			
1.	Pakaian Dinas	0		
2.	Tonfa dan Holster Tonfa (tongkat T)	0		
3.	Borgol	0		
4.	Tameng	0		
5.	Senter	0	15	
6.	Ferplas	0		
7.	Tas atau Ransel	0		
8.	Sleeping Bag	0		
9.	Jaket	0		
10	Rompi/Body Protector	18		
11	Masker	0		
II	**Perlengkapan Beregu**			
1.	Matras	0		
2.	Tenda Pleton	2	2	
3.	Peralatan Kebencanaan (Perahu Karet)	0		
4.	**Peralatan Komunikasi**			
	Handy Talky (HT)	31	31	
	Repeater	1	1	

Sumber Kartu Inventaris Barang

c. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN SPM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, serta sesuai dengan Visi

dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dapat disimpulkan 2 Indikator Kinerja pada renstra 2025 -2029 yakni :

a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Berikut Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

PENCAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tabel 2.c.1

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)					Rasio Capaian PadanTahun Ke (%)				
					Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	SEBELUM Perubahan 1. Persentase Penurunan Pelanggaran K3	100	100	90	90	95	-	-	95	100	91			-	105,5	111	101		
	2. Persentase penurunan pelanggaran K3 yang terselesaika			90	90	90	-	-	95	100	91			-	105,5	111	101		

Sumber Data Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)					Rasio Capaian PadanTahun Ke (%)				
					Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3. Rata Rata waktu tanggap bencana (Respontime				90	90					65	77			72	85			
	SESUDAH Perubahan 1. Persentase							85	85				98	99				115	116
	meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Penegakan Perda																		

Sumber Data Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)					Rasio Capaian PadanTahun Ke (%)				
					Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2. Persentase penanganan gangguan Trantibum yang tertangani							85	85				98	99				112	115
	3. Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani							85	85				100	100				117	117

Sumber Data Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)					Rasio Capaian PadanTahun Ke (%)				
					Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				SPM Trantibum															
				1. Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugiian materiil			100	100	100			100	100	100			100	100	100
				2. Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugiaan pengobatan			100	100	100			100	100	100			100	100	100

Sumber Data Aplikasi e-SPM

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)					Rasio Capaian PadanTahun Ke (%)				
					Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				3. Standar Operasional Prosedur Satpol PP			100	100	100			100	100	100			100	100	100
				4. Standar Sarana Prasarana Satpol PP			100	100	100			100	100	100			100	100	100
				5. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota perlindungan masyarakat			100	100	100			100	100	100			100	100	100

Sumber Data Aplikasi e-SPM

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)					Rasio Capaian PadanTahun Ke (%)				
					Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hokum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada			100	100	100			100	100	100			100	100	100

Sumber Data Aplikasi e-SPM

Tabel 2.c.2
Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nganjuk

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN					RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.749.671.555	8.603.270.906,00	8.264.780.550	7.331.389.089	8.941.951.558	6.898.825.393	7.402.323.767,51	7.241.571.619	6.884.354.603	7.061.191.541	89,02	86,04	87,62	93,90	79,02	8.178.214.284	7.098.677.999
B	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.880.954.600	2.696.792.400	3.447.756.439	4.876.509.000	5.791.231.500	3.838.928.900	1.647.005.900	3.212.144.947	4.496.567.735	5.715.408.540	61,07	61,07	93,17	92,19	98,69	4.138.878.788	3.782.010.513

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN					RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		87.642.550					74.136.300				84,59	84,59	0,00	0,00	0,00	17.528.510	14.827.260

Sumber Data Laporan Keuangan Tahun 2020s/d 2025

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Untuk Indikator Persentase Penurunan Pelanggaran K3 yang terselesaikan
   - Tahun 2020 di targetkan 90 % realisasi 95 % capaian Kinerja 105,5 %
   - Tahun 2021 ditargetkan 90 % realisasi 100 % capaian Kinerja 111 %
   - Tahun 2022 ditargetkan 90 % realisasi 91 % capaian Kinerja 101 %

   Penurunan Capaian Kinerja tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2021 akibat dari Covid 19 yang mewabah pada tahun tersebut kinerja Satpol PP mengalami Peningkatan hal ini disebabkan pada kegiatan Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan cegah dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengaman dan Pengawalan kinerja mengalami kenaikan, sehingga capaian Kinerja tahun 2021 meningkat bila dibandingkan tahun 2022 yang keadaan sudah menjadi normal kembali
2. Indikator Rata- Rata Waktu Tanggap Bencana (Respon Time)
   - Kinerja tahun 2020, 72 %, dan tahun 2021, 85 %.

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Lampiran Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah dan Unit Organisasi bersifat khusus, maka UPT Pemadam Kebakaran berdiri menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sehingga pada Renstra Reviu 2018-2023 UPT Pemadam Kebakaran terpisah dari Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini berpengaruh pada tujuan dan sasaran serta indicator pada Restra Perangkat Daerah .

1. Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani
2. Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani

   Capaian Kinerja Pada Indikator Persentase gangguan Trantibum yang tertangani :

   - Tahun 2023 ditargetkan 85 % terealisasi 98 % sehingga capaian kinerja 115 %

- Tahun 2024 ditargetkan 85 % terealisasi 99 % sehingga capaian kinerja 116 %

Capaian Kinerja Pada Indikator Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani

- Tahun 2023 ditargetkan 85 % terealisasi 100 % sehingga capaian kinerja 117 %
- Tahun 2024 ditargetkan 85 % terealisasi 100 % sehingga capaian kinerja 117 %

Penjelasan Target Indikator lainnya (SPM)

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan bagian dari layanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak masyarakat. SPM ini mengatur jenis dan kualitas pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensipnya interaksi antara warga dengan Pemertintah.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan Pelayanan Dasar yang harus diterima oleh masyarakat.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan Dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya untuk SPM urusan Trantibum ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Mutu Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Oleh sebab itu diperlukan strategi dan arah kebijakan yang diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, terkait dengan Pelayanan Dasar. Adapun arah kebijakan yang berkaitan dengan Pelaksanaan SPM Strandar Teknis Mutu Pelayan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi :

1. Jumlah Warga Negara yang berada di Radius 0-50 meter dari lokasi Penegakan Perda dan Perkada
2. Fasilitasi Umum dan Fasilitasi social serta Aset warga Negara yang terdampak Perda
3. SOP Kegiatan Penegakan Perda
4. Sarana dan Prasana
5. Sumber Daya Manusia
6. Rekapitulasi Warga yang terdampak Akibat Penegakan Perda
7. Rekapitulasi Asset yang dimiliki Warga Negara yang rusak Akibat hukum Penegakan Perda

Berdasarkan pada arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 , maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, menyusun strategi dan arah kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pada penjelasan diatas bahwa peningkatan ketentraman, ketertiban umum akan berhasil bergantung pada peran stekholder Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengoptimalkan capaian target dan sasaran. Disamping itu kesadaran masyarakat mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sangat membantu sekali capaian sasaran itu. Juga Pemenuhan seluruh instrument Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terukur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perlu terus diupayakan.

Penjelasan Tabel 2.c.2

Untuk mendukung Tujuan , Sasaran dan Indikator Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 s/d 2024, yang masing masing Anggaran dan Realisasi dapat dilihat pada Tabel 2.C.2, untuk anggaran yang tersedia untuk Penanganan gangguan Trantibum dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan yang fluktual.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di dalam daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat menciptakan Kondisi Ketertiban Ketentraman Masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyaraka melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib dan kondusif. Keadaan dinamis

seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan pemerintah maupun peraturan daerah turunanya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, di nyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat.

Menurut Ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk « **Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan Pelindungan masyarakat** « Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antra lain :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur,badan hukum yang melakukan pelanggaran perda dan/atau perkada ;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur ,atau badan hukum yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/ atau perkada ;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/atau Perkada

e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan beberapa kewenangan tersebut diatas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penegakan Perda dan Perkada, hal ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kerjasama dan kemitraan dengan Dinas Instansi Samping yang ada di Kabupaten Nganjuk. Oleh sebab itu untuk dapat mewujudkan

Kabupaten Nganjuk yang Tentram, Tertib dan Kondusif dilakukan Kemitraan dengan beberapa Dinas dan instansi Samping di antara :

1. Perjanjian Kerjasama Nomor : 000.4.7.2/04/PA/411.320/2025 dengan Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk
2. Perjanjian Kerjasama Nomor : 000.4.7.2/01/PA/411.320/2025 dengan Kepala Kepolisian Resort Nganjuk
3. Perjanjian Kerjasama Nomor : 000.4.7.2/02/PA/411.320/2025 dengan Komandan Subdenpom Persiapan Nganjuk
4. Perjanjian Kerjasama Nomor : 000.4.7.2/04/PA/411.320/2025 dengan Kejaksaan Negeri Nganjuk
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Pemadam Kebakaran
7. Dinas sosial
8. Dinas Kesehatan
9. Rumah Sakit Umum Daerah
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
11. Badan Penanggulangan Bencana
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Perhubungan
14. FKUB Kabupaten Nganjuk
15. Ketua PWI Kabupaten Nganjuk

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan Dasar masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja , dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan social masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketentraman,

ketertiban umum dan pelindungan masyarakat serta penegakan perda dan perkada maka dapat disimpulkan Pokok Masalah dan Akar Masalah yang dihadapi dalam Peyelenggaraan Urusan Trantibumlinmas.

Permasalah adalah kesenjangan antara kinerja yang di capai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, untuk pencapaian tujuan penyeleggaraan Pemerintah Daerah di masa 5 tahun yang akan datang, perlu dirumuskan masalah pokok, masalah dan akar masalah yang akan dilaksanakan dalam pencapaian kinerja.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih adanya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini	- Perlu diperbaruinya perda nomor 8 tahun 2013
		- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada	- Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal kesadaran mematuhi peraturan
		- Ketugasan dan fungsi PPNS yang belum berjalan optimal	- Perlunya penambahan anggota PPNS dan pembentukan sekretariat PPNS
		- Peran Satlinmas tingkat Desa /Kelurahan yang belum optimal	- Perlu adanya peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas
		- Rasio Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kab. Nganjuk dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai dengan peraturan menteri	- Penambahan Anggota Satpol PP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dalam negeri nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman,penetapan jumlah Polisi Pamong Praja - Besarnya aktivitas dan daya tarik investasi memunculkan Permasalahan bidang hukum, social dan ekonomi - Bertambahnya ruang publik di Kabupaten Nganjuk yang berpotensi menganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Inventasi yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah - Patroli wilayah kurang optimal

Identivikasi permasalahan dilakukan untuk melihat kompleksitas permasalahan pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sebagai strategi untuk mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman serta meningkatkan kekuatan dari intern Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Isu Strategis

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, serta sesuai dengan Visi dan misi Bupati Terpilih Satuan Polisi Pamong Praja masuk pada misi 1 (satu) yaitu : " Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban " dari Misi tersebut diatas Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah **"Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat "**

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	ISU KLHS Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Menegakkan peraturan daerah	- Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelengaraa n ketentraman dan ketertiban umum sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	– Kesulitan dalam pengawasan dan penegakkan Perda/ Perkada terutama dalam konteks otonomi daerah – Mengoptimal kan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakkan Perda/Perkada
Menjaga ketertiban umum	- Rasio Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kab. Nganjuk dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai					– Tantangan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tengah-tengah perubahan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	ISU KLHS Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman,penetapan jumlah Polisi Pamong Praja					social dan ekonomi – Membangun kerjasama yang efektif dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam – menjaga ketentraman dan ketertiban umum
	-					– Peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga ketentraman dan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	ISU KLHS Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
						ketertiban umum – Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain ~~untuk~~ meningkatkan efetivitas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat – Tantangan Peningkatan Ketenttraman dan Ketertiban Umum di tengah-tengah perubahan social dan ekonomi
	-					– Pelindungan masyarakat – Peran Satlinmas tingkat Desa /Kelurahan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	ISU KLHS Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
						yang belum optimal - Peran Satlinmas tingkat Desa /Kelurahan yang belum optimal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menegah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk . Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2025 - 2029

Adapun Perumusan Tujuan dan Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2025 – 2029 adalah **" Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat "**

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk disusun berdasarkan indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum
2. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja											
- Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban umum serta perlindungan masyarakat		Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum (IPKKU) (Indeks)	61	61	65	69	73	77	80	
			Nilai Indeks Satlinmas (Indeks)	61	61	65	69	73	77	80	
		Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	85	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	85	100	100	100	100	100	100	

3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga

Mengacu pada rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020- 2024, visi Kementerian Dalam Negeri Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan adalah "Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif dalam mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Dalam Negeri ". Salah satu kata kunci dalam visi dimaksud adalah Mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dan tata kelola kewilayahan yang efektif dan terintegrasi" sebagai gambaran kondisi hasil yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Misi ke dua Kementerian Dalam Negeri Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan adalah " Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Trantibum, Pelayanan Bencana, Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan Yang Sesuai Standar. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja kata kunci dari misi ke dua tersebut adalah meningkatkan pelayanan trantibum. Tujuan ke dua Kementerian Dalam Negeri Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan adalah Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Untuk mendukung pencapaian tujuan, sesuai dengan tupoksi Satpol – PP medukung Sasaran Strategis Pertama yaitu "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas".

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 (satu) ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:

- Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "baik";

- Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis tersebut, pada tingkatan program telah ditetapkan Sasaran

Program 1 (satu) yakni: "Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan pelayanan Damkar sesuai standar".

Keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1 ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja program, yaitu:

a. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas suburusan bencana;
b. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum;
c. Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat;
d. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran.

Sesuai dengan Inmendagri nomor 02 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029, maka sesuai dengan Tupoksi Satpol – PP, indeks penyelenggaraan Trantibumlimas sub urusan trantibum dan sub urusan perlindungan masyarakat menjadi indicator untuk mencapai tujuan dalam Renstra Satpol- PP Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 -2029

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 ditegaskan bahwa Lingkup muatan Rencana Tata Ruang Wilayah mencakup pengawasan penataan

ruang. Dan berdasarkan Pasal 5 huruf i, bahwa pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang melalui pengaturan izin serta pemantapan sistem kelembagaan ruang. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui ketentuan perizinan dan pengenaan sanksi. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja berperan sangat penting dalam penegakan peraturan daerah berkaitan dengan penertiban, penataan dan pemanfaatan tata ruang dan ijin mendirikan bangunan di kabupaten Nganjuk.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah analisa sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Tujuan kegiatan ini adalah menyusun dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-209 serta mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029. Sasaran yang dirumuskan diarahkan pada upaya untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diakomodir kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan upaya pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia sebagai pengganti Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs

di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Agenda SDGs terdiri dari 17 Tujuan/Goals. Satpol- PP masuk dalam tujuan 3 dan tujuan ke 16, yaitu : Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good health and well-being) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, justice, and strong institutions) Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan

Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Indikator TPB Satpol-PP yang sudah Dilaksanakan adalah Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dengan capaian target 100 % dari tahun 2019-2023.

Dalam Pencapaian Perencanaan Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah perlu disusun Penahapan restra Perangkat Daerah sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 3.2

Tabel Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pelaksanaan Diklat Satpol PP bagi seluruh Anggota Satpol PP	Pembentukan Sekretariat PPNS	Optimalisasi Peran Satlinmas dalam mendukung Trantibum	Penambahan Sarana dan Prasarana Satpol PP	Penambahan Anggota Satpol PP sesuai dengan Permendagri No tahun

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Diklat PPNS Penegak Perda	Pembentukan Tim Penyidik Pelanggar Perda	Tersedianya anggota Linmas masing masing Desa/Kel 1 Pleton	Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Satlinmas	Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Satlinmas

k

3.3 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan ,rumusan perencanaan komperhensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja.Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja seta dalam mengemban tugas dan fungsinya , agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan .

Sehubungan dengan tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan bab sebelumnya maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk 5 (lima) tahun mendatang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk maka perlu disusun strategi yang mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Untuk mengimpletasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk maka perlu disusun strategi yang mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Untuk mengimpletasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 – 2029 .

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

OPERASIONAL NSPK	PERCEPATAN PEMBANGUNANPEREKONOMIAN KABUPATEN NGANJUK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018	Percepatan Pembangunan Perekonomian Kabupaten Nganjuk	Pelaksanaan Pencegahan trantibum dan kerjasama antar lembaga melalui deteksi dini , cegah dini, pembinaan , Penyuluhan, pengamanan dan Patroli Wilayah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar		Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan anggota Satuan Pelindungan Masyarakat

OPERASIONAL NSPK	PERCEPATAN PEMBANGUNANPEREKONOMIAN KABUPATEN NGANJUK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat		Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada, Koordinasi kerjasama dalam pelaksanaan penegakan perda
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal		Penangganan atas pelaggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN , DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN MERUPAKAN HASIL CASCADING DARI TUJUAN, SASARAN, OUTCOME, DAN OUTPUT

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Satpol PP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah . Program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan Sub Kegiatan untuk setiap program. Pemilihan Program, kegiatan dan Sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana Program dilengkapi dengan Outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program.

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
- Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban umum serta perlindungan masyarakat				Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum (IPKKU) (Indeks)		
					Nilai Indeks Satlinmas (Indeks)		
		Meningkatnya penanganan gangguan trantibum			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA – SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
					Perangkat Daerah (Dokumen)	Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
					Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
					Tunjangan ASN (Orang/bulan)	dan Tunjangan ASN	
				Tersusunya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pegawai yang Tepat Waktu dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Akurat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tepat Waktu dan Akurat	(Dokumen)		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Yang Layak Pakai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Disediakan (Laporan)		
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Pajaknya (Unit)	Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pencegahan gangguan trantibum		Persentase gangguan trantibum yang dapat dicegah (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Peningkatan deteksi dini terhadap potensi gangguan trantibum	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
				Meningkatnya patroli pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
				Meningkatnya patroli pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya penindakan gangguan trantibum		Persentase penindakan gangguan trantibum yang tertangani (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terwujudnya Pengamanan Kegiatan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Pemerintah Daerah	Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter	1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya Kerjasama Penindakan Trantibum dengan Instansi Terkait	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kapasitasanya (Orang)	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
					Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan	1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
					Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan SDM nya melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas	1.05.02.2.01.0014 – Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Satpol PP dan Satlinmas	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Meningkatnya pemberdayaan Satlinmas		Persentase pemberdayaan Satlinmas (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam rangka Trantibumlinmas	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
					Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan SDM nya melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas	1.05.02.2.01.0014 – Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Satpol PP dan Satlinmas	
		Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada		Persentase pelanggaran Perda yang tertangani (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya sosialisasi pelaksanaan penegakan perda dan perkada	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Meningkatnya pengawasan atas kepatuhan masyarakat terhadap penegakkan perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan	1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya penindakan terhadap pelanggaran perda	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS	
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
				Meningkatnya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	

4.2 Uraian Program, Kegiatan, SubKegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dapat kami sajikan sebagai berikut:

Program utama yang berhubungan langsung dengan capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
- **Kegiatan**
  - Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1
    (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
  - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
  - Pemberdayaa Satgas Daerah di Kabupaten/Kota

Selain program diatas, terdapat juga program penunjang demi tercapainya sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/**
- **Kegiatan**
  - Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dapat di gambarkan pada table sebagai berikut :

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					12.237.413.219,00		17.381.254.273,00		18.004.147.714,00		18.845.166.228,00		19.937.888.387,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.889.647.719,00		11.669.367.273,00		12.119.919.714,00		12.725.161.028,00		13.303.795.787,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	78,50	90	79,25	7.889.647.719,00	81,50	11.669.367.273,00	83	12.119.919.714,00	83,50	12.725.161.028,00	84	13.303.795.787,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.347.765.500,00		5.711.887.000,00		5.884.228.000,00		6.120.005.200,00		6.634.092.600,00	
Meningkatnya pencegahan gangguan trantibum	Persentase gangguan trantibum yang dapat dicegah (%)	85	85	65	1.955.163.650,00	69	3.147.900.000,00	73	3.147.900.000,00	77	3.164.700.000,00	80	3.539.800.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penindakan gangguan trantibum	Persentase penindakan gangguan trantibum yang tertangani (%)	65	65	69	1.212.269.800,00	73	1.230.270.000,00	77	1.365.270.000,00	80	1.490.270.000,00	80	1.525.270.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani (%)	65	65	69	456.600.650,00	73	358.717.000,00	77	396.058.000,00	80	490.035.200,00	80	594.022.600,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pemberdayaan Satlinmas	Persentase pemberdayaan Satlinmas (%)	33	40	43	723.731.400,00	73	975.000.000,00	77	975.000.000,00	80	975.000.000,00	80	975.000.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					12237413219.00		17381254273.00		18004147714.00		18845166228.00		19937888387.00	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.237.413.219,00		17.381.254.273,00		18.004.147.714,00		18.845.166.225,00		19.937.888.387,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.889.647.719,00		11.669.367.273,00		12.119.919.714,00		12.725.161.028,00		13.303.795.787,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	78,50	79,25	7.889.647.719,00	81,50	11.669.367.273,00	83	12.119.919.714,00	83,50	12.725.161.028,00	84	13.303.795.787,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				69.142.000,00		85.052.500,00		97.770.500,00		112.972.000,00		126.522.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5	69.142.000,00	5	85.052.500,00	5	97.770.500,00	5	112.972.000,00	5	126.522.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	6		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	7		7		7		7		7			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				36.406.000,00		44.636.500,00		51.312.000,00		59.276.000,00		67.471.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	7	36.406.000,00	7	44.636.500,00	7	51.312.000,00	7	59.276.000,00	7	67.471.000,00		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				14.628.000,00		16.800.000,00		19.300.000,00		22.200.000,00		25.550.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	6	14.628.000,00	1	16.800.000,00	1	19.300.000,00	1	22.200.000,00	1	25.550.000,00		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.968.000,00		5.800.000,00		6.670.000,00		7.670.000,00		8.820.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.968.000,00	1	5.800.000,00	1	6.670.000,00	1	7.670.000,00	1	8.820.000,00		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.840.000,00		6.716.000,00		7.723.500,00		8.882.000,00		10.214.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	5	5.840.000,00	5	6.716.000,00	5	7.723.500,00	5	8.882.000,00	5	10.214.000,00		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.300.000,00		6.500.000,00		7.475.000,00		8.596.000,00		8.850.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5	3.300.000,00	5	6.500.000,00	5	7.475.000,00	5	8.596.000,00	5	8.850.000,00		
1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.000.000,00		4.600.000,00		5.290.000,00		6.348.000,00		7.617.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	1	4.000.000,00	1	4.600.000,00	1	5.290.000,00	1	6.348.000,00	1	7.617.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.838.890.000,00		7.237.974.413,00		7.240.001.413,00		7.242.055.913,00		7.244.417.413,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53	53	4.828.962.000,00	53	7.226.302.413,00	53	7.226.302.413,00	53	7.226.302.413,00	53	7.226.302.413,00		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.828.962.000,00		7.226.302.413,00		7.226.302.413,00		7.226.302.413,00		7.226.302.413,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	53	53	4.828.962.000,00	53	7.226.302.413,00	53	7.226.302.413,00	53	7.226.302.413,00	53	7.226.302.413,00		
Tersusunya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	1	9.928.000,00	1	11.672.000,00	1	13.699.000,00	1	15.753.500,00	1	18.115.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.112.000,00		6.134.000,00		7.054.000,00		8.112.000,00		9.328.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	1	5.112.000,00	1	6.134.000,00	1	7.054.000,00	1	8.112.000,00	1	9.328.000,00		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.816.000,00		5.538.000,00		6.645.000,00		7.641.500,00		8.787.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	4.816.000,00	18	5.538.000,00	18	6.645.000,00	18	7.641.500,00	18	8.787.000,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				241.000.000,00		271.050.000,00		305.900.000,00		346.510.000,00		393.432.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	86	86	120.000.000,00	86	144.000.000,00	86	172.800.000,00	86	207.360.000,00	86	248.232.000,00		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				120.000.000,00		144.000.000,00		172.800.000,00		207.360.000,00		248.232.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	86	86	120.000.000,00	86	144.000.000,00	86	172.800.000,00	86	207.360.000,00	86	248.232.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pegawai yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	10	121.000.000,00	10	127.050.000,00	10	133.100.000,00	10	139.150.000,00	10	145.200.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	50		50		50		50		50			
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				46.000.000,00		48.300.000,00		50.600.000,00		52.900.000,00		55.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	10	46.000.000,00	10	48.300.000,00	10	50.600.000,00	10	52.900.000,00	10	55.200.000,00		
1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75.000.000,00		78.750.000,00		82.500.000,00		86.250.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	50	75.000.000,00	50	78.750.000,00	50	82.500.000,00	50	86.250.000,00	50	90.000.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				711.565.700,00		815.360.827,00		961.232.362,00		1.135.204.589,00		1.342.889.505,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	15	261.451.450,00	15	297.067.740,00	15	339.280.658,00	15	388.862.545,00	15	447.279.053,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	2		6		7		8		8			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		4		4		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		4		4		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5		5		6		7		7			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.181.200,00		8.617.440,00		10.340.298,00		12.409.113,00		14.890.935,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	7.181.200,00	5	8.617.440,00	6	10.340.298,00	7	12.409.113,00	7	14.890.935,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.500.000,00		44.625.000,00		46.750.000,00		48.875.000,00		51.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	1	42.500.000,00	1	44.625.000,00	1	46.750.000,00	1	48.875.000,00	1	51.000.000,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				65.000.000,00		68.250.000,00		71.500.000,00		74.750.000,00		78.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	15	65.000.000,00	15	68.250.000,00	15	71.500.000,00	15	74.750.000,00	15	78.000.000,00		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				133.390.250,00		160.068.300,00		192.081.960,00		230.498.352,00		276.592.022,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	133.390.250,00	4	160.068.300,00	4	192.081.960,00	5	230.498.352,00	5	276.592.022,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.980.000,00		12.627.000,00		15.152.400,00		18.182.880,00		21.819.456,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	10.980.000,00	4	12.627.000,00	4	15.152.400,00	5	18.182.880,00	5	21.819.456,00		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.400.000,00		2.880.000,00		3.456.000,00		4.147.200,00		4.976.640,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	2	2.400.000,00	6	2.880.000,00	7	3.456.000,00	8	4.147.200,00	8	4.976.640,00		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	36	41	450.114.250,00	41	518.293.087,00	49	621.951.704,00	59	746.342.044,00	71	895.610.452,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	108	124		124		148		177		212			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7	8		8		9		10		11			
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				28.800.250,00		33.120.287,00		39.744.344,00		47.693.212,00		57.231.854,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	36	41	28.800.250,00	41	33.120.287,00	49	39.744.344,00	59	47.693.212,00	71	57.231.854,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				408.080.000,00		469.292.000,00		563.150.400,00		675.780.480,00		810.936.576,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	108	124	408.080.000,00	124	469.292.000,00	148	563.150.400,00	177	675.780.480,00	212	810.936.576,00		
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				13.234.000,00		15.880.800,00		19.056.960,00		22.868.352,00		27.442.022,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7	8	13.234.000,00	8	15.880.800,00	9	19.056.960,00	10	22.868.352,00	11	27.442.022,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.126.076.619,00		1.181.291.943,00		1.217.550.331,00		1.261.060.397,00		1.313.272.476,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	1.126.076.619,00	1	1.181.291.943,00	1	1.217.550.331,00	1	1.261.060.397,00	1	1.313.272.476,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	1		3		4		5		5			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				60.000.000,00		102.000.000,00		122.400.000,00		146.880.000,00		176.256.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	1	60.000.000,00	3	102.000.000,00	4	122.400.000,00	5	146.880.000,00	5	176.256.000,00		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				66.076.619,00		79.291.943,00		95.150.331,00		114.180.397,00		137.016.476,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	66.076.619,00	1	79.291.943,00	1	95.150.331,00	1	114.180.397,00	1	137.016.476,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				249.392.500,00		299.121.375,00		358.945.650,00		430.734.780,00		503.714.376,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	4	249.392.500,00	4	299.121.375,00	5	358.945.650,00	6	430.734.780,00	6	503.714.376,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	3		3		4		5		5			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.992.500,00		3.441.375,00		4.129.650,00		4.955.580,00		5.946.696,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.992.500,00	1	3.441.375,00	1	4.129.650,00	1	4.955.580,00	1	5.946.696,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				94.000.000,00		112.800.000,00		135.360.000,00		162.432.000,00		194.918.400,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	4	94.000.000,00	4	112.800.000,00	5	135.360.000,00	6	162.432.000,00	6	194.918.400,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				152.400.000,00		182.880.000,00		219.456.000,00		263.347.200,00		302.849.280,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	3	152.400.000,00	3	182.880.000,00	4	219.456.000,00	5	263.347.200,00	5	302.849.280,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				653.580.900,00		1.779.516.215,00		1.938.519.458,00		2.196.623.349,00		2.377.548.017,00		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	3	653.580.900,00	3	1.779.516.215,00	3	1.938.519.458,00	3	2.196.623.349,00	3	2.377.548.017,00		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	3		4		3		4		5			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		1		1		1		1			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				86.564.900,00		99.549.635,00		119.459.562,00		143.351.474,00		172.021.768,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	86.564.900,00	1	99.549.635,00	1	119.459.562,00	1	143.351.474,00	1	172.021.768,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				443.021.200,00		509.474.380,00		611.369.256,00		733.643.107,00		830.371.728,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36	36	443.021.200,00	36	509.474.380,00	36	611.369.256,00	36	733.643.107,00	36	830.371.728,00		
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				30.000.000,00		31.500.000,00		33.000.000,00		34.500.000,00		36.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	3	30.000.000,00	3	31.500.000,00	3	33.000.000,00	3	34.500.000,00	3	36.000.000,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				78.994.800,00		118.492.200,00		142.190.640,00		170.628.768,00		204.754.521,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	3	78.994.800,00	4	118.492.200,00	3	142.190.640,00	4	170.628.768,00	5	204.754.521,00		
1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		17.500.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	17.000.000,00	2	17.500.000,00	2	18.000.000,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		955.500.000,00		955.500.000,00		1.025.000.000,00		1.030.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	0,00	1	955.500.000,00	1	955.500.000,00	1	1.025.000.000,00	1	1.030.000.000,00		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		86.400.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	72.000.000,00	1	86.400.000,00		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.347.765.500,00		5.711.867.000,00		5.884.228.000,00		6.120.005.200,00		6.634.092.600,00		
Meningkatnya pemberdayaan Satlinmas	Persentase pemberdayaan Satlinmas (%)	33	43	723.731.400,00	73	975.000.000,00	77	975.000.000,00	80	975.000.000,00	80	975.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.891.164.850,00		5.353.170.000,00		5.488.170.000,00		5.629.970.000,00		6.040.070.000,00		
Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam rangka Trantibumlinmas	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	-	200	723.731.400,00	200	975.000.000,00	200	975.000.000,00	200	975.000.000,00		975.000.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	268	205		272		272		272		272			
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				423.761.400,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	268	205	423.761.400,00	272	550.000.000,00	272	550.000.000,00	272	550.000.000,00	272	550.000.000,00		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				299.970.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	-	200	299.970.000,00	200	425.000.000,00	200	425.000.000,00	200	425.000.000,00		425.000.000,00		
Meningkatnya pencegahan gangguan trantibum	Persentase gangguan trantibum yang dapat dicegah (%)	65	65	1.955.163.650,00	69	3.147.900.000,00	73	3.147.900.000,00	77	3.164.700.000,00	80	3.539.800.000,00		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.891.164.850,00		5.353.170.000,00		5.488.170.000,00		5.629.970.000,00		6.040.070.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya petroli pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	10,847	9	1.955.163.650,00	9	3.088.200.000,00	9	3.088.200.000,00	12	3.105.000.000,00	15	3.460.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	10,545	48		48		48		48		48			
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				31.129.800,00		128.200.000,00		128.200.000,00		145.000.000,00		165.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	10,847	9	31.129.800,00	9	128.200.000,00	9	128.200.000,00	12	145.000.000,00	15	165.000.000,00		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				1.924.033.850,00		2.960.000.000,00		2.960.000.000,00		2.960.000.000,00		3.315.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	10,545	48	1.924.033.850,00	48	2.960.000.000,00	48	2.960.000.000,00	48	2.960.000.000,00	48	3.315.000.000,00		
Peningkatan deteksi dini terhadap potensi gangguan trantibum	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	-	-	0,00	21	59.700.000,00	21	59.700.000,00	21	59.700.000,00	21	59.800.000,00		
1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota				0,00		59.700.000,00		59.700.000,00		59.700.000,00		59.800.000,00		
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	-	-	0,00	21	59.700.000,00	21	59.700.000,00	21	59.700.000,00	21	59.800.000,00		
Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani (%)	65	69	456.600.850,00	73	358.717.000,00	77	396.056.000,00	80	490.035.200,00	80	594.022.600,00		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				313.070.750,00		213.599.000,00		257.140.000,00		339.167.200,00		442.753.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengawasan atas kepatuhan masyarakat terhadap penegakkan perda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	15	20	150.544.600,00	44	134.510.000,00	48	155.001.000,00	55	173.826.000,00	55	176.085.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	46	46		46		48		55		60			
	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	8	8		10		11		11		11			
	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	-	2		2		4		5		5			
1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20.000.000,00		16.250.000,00		17.875.000,00		17.675.000,00		18.975.000,00		
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	8	8	20.000.000,00	10	16.250.000,00	11	17.875.000,00	11	17.875.000,00	11	18.975.000,00		
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				14.599.700,00		14.660.000,00		28.276.000,00		35.026.000,00		34.910.000,00		
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	-	2	14.599.700,00	2	14.660.000,00	4	28.276.000,00	5	35.026.000,00	5	34.910.000,00		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				65.812.500,00		53.950.000,00		57.550.000,00		63.850.000,00		60.980.000,00		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	15	20	65.812.500,00	44	53.950.000,00	48	57.550.000,00	55	63.850.000,00	55	60.980.000,00		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				50.132.400,00		49.650.000,00		51.300.000,00		57.075.000,00		61.200.000,00		
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	46	46	50.132.400,00	46	49.650.000,00	48	51.300.000,00	55	57.075.000,00	60	61.200.000,00		
Meningkatnya sosialisasi pelaksanaan penegakan perda dan perkada	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	-	2	162.526.150,00	3	79.089.000,00	4	102.139.000,00	5	165.341.200,00	5	266.688.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	4	6		6		6		8		8			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	5	5		5		8		12		20			
1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				9.400.000,00		12.900.000,00		16.050.000,00		16.050.000,00		21.400.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	4	6	9.400.000,00	6	12.900.000,00	6	16.050.000,00	8	16.050.000,00	8	21.400.000,00		
1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				3.126.150,00		3.266.000,00		4.796.000,00		6.196.000,00		6.796.000,00		
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	-	2	3.126.150,00	3	3.266.000,00	4	4.796.000,00	5	6.196.000,00	5	6.796.000,00		
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				150.000.000,00		62.923.000,00		81.293.000,00		143.095.200,00		238.492.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	5	5	150.000.000,00	5	62.923.000,00	8	81.293.000,00	12	143.095.200,00	20	238.492.000,00		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				143.529.900,00		145.118.000,00		138.918.000,00		150.868.000,00		151.269.600,00		
Meningkatnya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	-	4	25.000.000,00	4	25.420.000,00	4	29.420.000,00	4	33.020.000,00	4	34.500.000,00		
1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				25.000.000,00		25.420.000,00		29.420.000,00		33.020.000,00		34.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	-	4	25.000.000,00	4	25.420.000,00	4	29.420.000,00	4	33.020.000,00	4	34.500.000,00		
Terlaksananya penindakan terhadap pelanggaran perda	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	-	1	118.529.900,00	1	119.698.000,00	1	109.498.000,00	1	117.848.000,00	4	116.769.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	4	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	-	2		2		4		4		4			
	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS				7.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	-	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	4	8.000.000,00		
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				66.530.000,00		66.530.000,00		66.530.000,00		66.588.000,00		66.978.000,00		
Tersedianya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	-	1	66.530.000,00	1	66.530.000,00	1	66.530.000,00	1	66.588.000,00	1	66.978.000,00		
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				15.000.000,00		15.000.000,00		16.200.000,00		16.500.000,00		16.750.000,00		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	-	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	4	16.200.000,00	4	16.500.000,00	4	16.750.000,00		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				29.999.900,00		30.668.000,00		19.268.000,00		26.760.000,00		25.041.600,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	4	6	29.999.900,00	6	30.668.000,00	6	19.268.000,00	6	26.760.000,00	6	25.041.600,00		
Meningkatnya penindakan gangguan trantibum	Persentase penindakan gangguan trantibum yang tertangani (%)	65	69	1.212.269.800,00	73	1.230.270.000,00	77	1.365.270.000,00	80	1.490.270.000,00	80	1.525.270.000,00		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.891.184.850,00		5.353.170.000,00		5.488.170.000,00		5.629.970.000,00		6.040.070.000,00		
Meningkatnya Kerjasama Penindakan Trantibum dengan Instansi Terkait	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	-	70	347.270.000,00	70	375.270.000,00	70	480.270.000,00	70	585.270.000,00	70	690.270.000,00		
	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	78	83		85		85		90		90			
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	-	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	11	25		25		25		25		25			
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	118	150		150		200		250		250			
	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	-	3		4		4		4		4			
1.05.02.2.01.0006 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				7.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	11	25	7.000.000,00	25	25.000.000,00	25	30.000.000,00	25	35.000.000,00	25	40.000.000,00		
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional				34.990.000,00		34.990.000,00		34.990.000,00		34.990.000,00		34.990.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	-	3	34.990.000,00	3	34.990.000,00	3	34.990.000,00	3	34.990.000,00	3	34.990.000,00		
1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan				15.280.000,00		15.280.000,00		15.280.000,00		15.280.000,00		15.280.000,00		
meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	-	3	15.280.000,00	4	15.280.000,00	4	15.280.000,00	4	15.280.000,00	4	15.280.000,00		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				140.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (Orang)	-	70	140.000.000,00	70	150.000.000,00	70	200.000.000,00	70	250.000.000,00	70	250.000.000,00		
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	78	83	25.000.000,00	85	25.000.000,00	85	30.000.000,00	90	35.000.000,00	90	35.000.000,00		
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				125.000.000,00		125.000.000,00		170.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	118	150	125.000.000,00	150	125.000.000,00	200	170.000.000,00	250	215.000.000,00	250	215.000.000,00		
Terwujudnya Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	2	5	864.999.800,00	5	855.000.000,00	5	885.000.000,00	5	905.000.000,00	5	935.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	3	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	56	375		375		375		375		375			
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				740.170.800,00		750.000.000,00		780.000.000,00		800.000.000,00		830.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	56	375	740.170.800,00	375	750.000.000,00	375	780.000.000,00	375	800.000.000,00	375	830.000.000,00		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	2	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				119.829.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	3	5	119.829.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		

4.4 IKU (Indikator Kinerja Utama)

Untuk mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dibutuhkan instrumen yang tepat dan terukur dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja periode 5 tahun dengan menetapkan IKU yang berfungsi sebagai pengendalian kinerja organisasi/ unit kerja untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Sebagaimana dituangkan dalam table 4.4

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja									
2.	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum (IPKKU)	Indeks	61	61	65	69	73	77	80	
3.	Nilai Indeks Satlinmas	Indeks	61	61	65	69	73	77	80	

4.5 IKI (Indikator Kinerja Kunci)

Dalam Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di samping melaksanakan Indikator Kierja Utama , juga melaksanakan indicator kinerja kunci yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu kegiatan atau program, dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana dituangkan dalam table 4.5

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	positif	%	85	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	positif	%	85	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum (IPKKU)	positif	Indeks	61	61	65	69	73	77	80	
5.	Nilai Indeks Satlinmas	positif	Indeks	61	61	65	69	73	77	80	

BAB V
P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029, yang terukur berkesinambungan,realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnyarenstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan Pembangunan pada kurun waktu tahun 2025-2029, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapain dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Restra ini akan dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pada akhirnya Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025- 2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan Pedoman bagi seluruh personil Satpol PP beserta stakeholder, dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan Sasaran Satpol PP secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keseralaran dan singkronisasi dalam pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Nganjuk, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK

MARHAEN DJUMADI

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001